

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	8
B. Tinjauan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	12
1. Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah `	17
2. Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	19
3. Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	22
4. Pihak-pihak yang Terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa	25
C. Tinjauan tentang Perjanjian/Kontrak Pengadaan barang/Jasa pemerintah	38
1. Pengertian Perjanjian	38
2. Asas-asas Perjanjian	39
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	41
4. Perjanjian/Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	43
5. Jenis Perjanjian/Kontrak dalam Pengadaan barang dan Jasa Pemerintahan	43
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Data	49

B. Alat Pengumpul Data	49
C. Bahan Hukum	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Aspek-aspek Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	52
1. Aspek Hukum Administrasi Negara	58
2. Aspek Hukum Perdata	64
3. Kerugian Negara/Daerah	67
3.1 Pengertian Kerugian Negara/Daerah.....	67
3.2 Yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara.....	73
3.3 Sumber dan Besarnya Kerugian Keuangan Negara/Daerah.....	74
3.4 Mitigasi Risiko Hukum dalam Pengadaan.....	76
4. Aspek Hukum Pidana (Tindak Pidana Korupsi)	77
B. Perlindungan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ...	86
1. Upaya Perlindungan dalam Pelanggaran Prosedural	86
2. Kehendak Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	92
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97